

Judul : Menyegerakan RUU TPKS
Tanggal : Kamis, 06 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

EDITORIAL

Menyegerakan RUU TPKS



PERJALANAN panjang dan berliku bagi bangsa ini untuk menegakkan Rancangan Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Butuh energi baru. Energi itu datang dari Presiden Joko Widodo yang turun gunung agar RUU TPKS segera dibahas dan disahkan.

Bagi Presiden, tidak ada alasan lagi untuk terus menunda proses pembahasan RUU TPKS. Dia menekankan harus ada percepatan mengingat semakin banyak kasus kekerasan seksual kepada perempuan, lebih khusus lagi terhadap anak-anak.

Bagi Presiden, RUU TPKS mutlak dipercepat sehingga ada payung hukum perlindungan maksimal bagi korban kekerasan seksual. Dia pun menginstruksikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga berkoordinasi dengan DPR untuk mengakselerasi pembahasan RUU TPKS.

Sikap Presiden itu patut diapresiasi. Dia tak sabar karena RUU TPKS lebih banyak menjadi ajang silang argumen di jajaran pembuat undang-undang. Embrio RUU itu sudah ada sejak 2016, tetapi sampai saat ini masih pada tahapan menunggu untuk disahkan sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa Sidang III pertengahan bulan ini.

Sikap Presiden itu patut diapresiasi. Dia tak sabar karena RUU TPKS lebih banyak menjadi ajang silang argumen di jajaran pembuat undang-undang. Embrio RUU itu sudah ada sejak 2016, tetapi sampai saat ini masih pada tahapan menunggu untuk disahkan sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa Sidang III pertengahan bulan ini.

Sikap Presiden itu patut diapresiasi. Dia tak sabar karena RUU TPKS lebih banyak menjadi ajang silang argumen di jajaran pembuat undang-undang. Embrio RUU itu sudah ada sejak 2016, tetapi sampai saat ini masih pada tahapan menunggu untuk disahkan sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa Sidang III pertengahan bulan ini.

Sikap Presiden itu patut diapresiasi. Dia tak sabar karena RUU TPKS lebih banyak menjadi ajang silang argumen di jajaran pembuat undang-undang. Embrio RUU itu sudah ada sejak 2016, tetapi sampai saat ini masih pada tahapan menunggu untuk disahkan sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa Sidang III pertengahan bulan ini.

Sikap Presiden itu patut diapresiasi. Dia tak sabar karena RUU TPKS lebih banyak menjadi ajang silang argumen di jajaran pembuat undang-undang. Embrio RUU itu sudah ada sejak 2016, tetapi sampai saat ini masih pada tahapan menunggu untuk disahkan sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa Sidang III pertengahan bulan ini.

Sikap Presiden itu patut diapresiasi. Dia tak sabar karena RUU TPKS lebih banyak menjadi ajang silang argumen di jajaran pembuat undang-undang. Embrio RUU itu sudah ada sejak 2016, tetapi sampai saat ini masih pada tahapan menunggu untuk disahkan sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa Sidang III pertengahan bulan ini.

Sikap Presiden itu patut diapresiasi. Dia tak sabar karena RUU TPKS lebih banyak menjadi ajang silang argumen di jajaran pembuat undang-undang. Embrio RUU itu sudah ada sejak 2016, tetapi sampai saat ini masih pada tahapan menunggu untuk disahkan sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa Sidang III pertengahan bulan ini.

Sikap Presiden itu patut diapresiasi. Dia tak sabar karena RUU TPKS lebih banyak menjadi ajang silang argumen di jajaran pembuat undang-undang. Embrio RUU itu sudah ada sejak 2016, tetapi sampai saat ini masih pada tahapan menunggu untuk disahkan sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa Sidang III pertengahan bulan ini.

Sikap Presiden itu patut diapresiasi. Dia tak sabar karena RUU TPKS lebih banyak menjadi ajang silang argumen di jajaran pembuat undang-undang. Embrio RUU itu sudah ada sejak 2016, tetapi sampai saat ini masih pada tahapan menunggu untuk disahkan sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa Sidang III pertengahan bulan ini.

Sikap Presiden itu patut diapresiasi. Dia tak sabar karena RUU TPKS lebih banyak menjadi ajang silang argumen di jajaran pembuat undang-undang. Embrio RUU itu sudah ada sejak 2016, tetapi sampai saat ini masih pada tahapan menunggu untuk disahkan sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa Sidang III pertengahan bulan ini.